



PENGELOLAAN DANA HIBAH PILKADA YOGYA 2024 Bawaslu Gandeng Bank BPD DIY

YOGYA (KR) - Bawaslu Kota Yogya menggandeng PT Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk melakukan pengelolaan dana hibah Pilkada Yogya 2024. Terutama dana hibah yang diberikan oleh Pemkot Yogya untuk mendukung operasional pemilihan kepala daerah.

Ketua Bawaslu Kota Yogya Andie Kartala, menyebut pihaknya sudah menerima dana hibah pilkada dari Pemkot Yogya pada akhir tahun 2023 lalu. "Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk operasional Pilkada Kota Yogya 2024 dari Pemkot saat itu dibarengkan dengan KPU. Ada beberapa daerah yang dicairkannya dalam dua tahap, tetapi di Kota Yogya baik untuk KPU maupun Bawaslu semuanya diberikan satu tahap," jelasnya, Selasa (26/3).

Total dana hibah yang dikucurkan Pemkot Yogya melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk kebutuhan Pilkada 2024 mencapai sekitar Rp 45 miliar. Masing-masing diberikan untuk KPU Kota Yogya sebesar Rp 34 miliar, dan Bawaslu Kota Yogya sebesar Rp 11 miliar. Khusus untuk Bawaslu Kota Yogya, dukungan dari Pemkot tersebut untuk pelaksanaan pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota.

Andie mengaku, untuk mengelola dana hibah tersebut pihaknya membutuhkan perbankan sebagai mitra. Terutama untuk proses penyaluran anggaran operasional baik pada Bawaslu maupun jajaran di bawahnya seperti pengawas kecamatan, peng-

awas kelurahan hingga pengawas TPS. "Penandatanganan kerja sama dengan Bank BPD Cabang Senopati sudah kami lakukan pada Senin (25/3) kemarin. BPD DIY sudah sangat berpengalaman dalam penyaluran dana sampai di tingkat bawah," tandasnya.

Kegiatan pengawasan tahapan pilkada, imbuh Andie, juga sudah akan berjalan. Pertengahan April mendatang, pembentukan badan adhoc untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah mulai dilakukan. Hal itu akan dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih dan tahapan teknis lainnya. Selama tahapan berjalan, maka pengawasan yang dilakukan oleh tim Bawaslu harus dilakukan. "Bawaslu Kota Yogya sangat membutuhkan kerja sama dengan semua pihak termasuk BPD DIY. Semoga dengan kerja sama ini, pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar khususnya dari segi operasional dan penyaluran dana hibah hingga sampai pada pengawas TPS," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Bawaslu DIY Screning Yosmar Dano, mengungkapkan untuk pengaturan terkait bank hibah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Masing-masing daerah diberi kewenangan untuk memilih bank penampung dana hibah.

"Karena dana hibah ini bersumber dari APBD, maka kami memutuskan untuk pengelolaan keuangan hibah tingkat kecamatan sampai ke pengawas TPS menggunakan bank BPD DIY," ujarnya. (Dhi) f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005